

BANK DKI SUMBANG DIVIDEN TERBESAR UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA



Sumber gambar: <https://m.beritajakarta.id>

Bank DKI menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) penyumbang dividen terbesar bagi Provinsi DKI Jakarta sepanjang 2023.

Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono, menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah menyumbangkan dividen terbesar bagi Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan laporan keuangan yang diaudit, Bank DKI mampu membukukan laba bersih pada tahun 2023 sebesar Rp 1,02 triliun.

Melalui Keputusan RUPS Tahunan Bank DKI Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada 22 Maret 2024 lalu, Bank DKI telah menyalurkan dividen sebesar 32,00 persen atau senilai Rp326,44 miliar dari laba bersih Bank DKI Tahun 2023 sebesar Rp1,02 triliun rupiah atau dengan dividen *payout* sebesar 32 persen.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap Bank DKI yang selalu berkembang dan *on track*, untuk menjadi pendorong utama dalam sinergi antar BUMD DKI Jakarta. “Saya berharap peningkatan laba dan dividen Bank DKI yang semakin meningkat selaras dengan kinerja Bank DKI untuk mendukung terwujudnya Jakarta sebagai Global City dengan terobosan produk dan layanan perbankan yang inovatif dan adaptif,” ungkap Nasruddin, Jumat (19/4).

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono, menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BUMD DKI Jakarta atas hubungan baik dan sinergi yang telah terjalin selama ini.

Di usia yang genap berusia 63 tahun, Bank DKI mengangkat tema "Bertumbuh, Berkelanjutan Bersama Jakarta" guna mencerminkan tekad terus berkontribusi dalam pembangunan Jakarta

yang berkelanjutan."Kami terus hadir menjadi pilihan bagi masyarakat Jakarta, dengan berbagai produk dan layanan perbankan yang inovatif dan adaptif," tegas Amirul.

Untuk mendukung visi Jakarta menjadi Kota Global, Bank DKI telah melakukan elektronifikasi pengelolaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui layanan sistem manajemen kas (*cash management system/CMS*) Bank DKI. Dengan menggunakan CMS Bank DKI, SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mudah dapat memantau aktivitas transaksi penerimaan dan pengeluaran anggaran pada rekening milik SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara nyata (*real time*) dan lebih akurat.

Di tahun 2023, Bank DKI mencatatkan laba bersih Rp1,02 triliun atau naik 8,63% secara tahunan (*year on year/yoy*) dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya Rp939 miliar. Capaian laba bank DKI terdorong pendapatan bunga yang naik 17,82% yoy menjadi Rp5,34 triliun. Selain itu pendapatan berbasis komisi atau *fee based income* mencapai Rp625 miliar, naik 8,47% yoy.

Sumber Berita :

1. <https://m.beritajakarta.id/>, Bank DKI Sumbang Dividen Terbesar untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 19 April 2024.
2. <https://www.antaraneews.com/>, Bank DKI jadi penyumbang dividen terbesar DKI Jakarta pada 2023, 20 April 2024.
3. <https://www.neraca.co.id/>, Setor Dividen Rp326,44 Miliar - Bank DKI Sumbang Dividen Terbesar Ke Provinsi, 22 April 2024.
4. <https://money.kompas.com/>, Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 25 April 2024.

Catatan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, berdasarkan Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan bahwa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

3. Laba bersih, berdasarkan Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), berdasarkan Pasal 1 angka 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
5. Transaksi penerimaan dan pengeluaran anggaran yang dimaksud pada berita di atas terdapat pada Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD, yang berdasarkan Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Catatan Akhir:

1. **Dividen**/*di-vi-den/ /dividén/ n* **Dag 1** bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham; **2** sejumlah uang yang berasal dari hasil keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham sebuah perseroan.
 - akhir tahun Dag dividen yang dideklarasikan sesudah laba bersih tahun yang bersangkutan ditentukan secara cermat;
 - ekstra Dag pembayaran dividen tambahan di luar dividen tahunan, tetapi tidak merupakan kewajiban yang harus dilakukan;
 - saham Dag dividen dalam bentuk saham dari salah satu golongan saham sendiri pada perusahaan yang bersangkutan.
(<https://kbbi.web.id/dividen>)
2. **Laporan keuangan adalah** ringkasan informasi keuangan yang disajikan secara sistematis dan terstruktur, yang mencerminkan hasil operasi, posisi keuangan, dan arus kas suatu entitas (perusahaan) dalam periode tertentu. Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, atau *International Financial Reporting Standards* (IFRS) di dunia internasional. (Sayoga Prasetyo, Laporan Keuangan: Pengertian, Jenis, dan Contohnya, <https://pina.id/artikel/detail/laporan-keuangan-pengertian-jenis-dan-contohnya-mlaym46fxi0>, 31 Januari 2024)
3. **Audit**/*au-dit/ n* **1** pemeriksaan pembukuan tentang keuangan (perusahaan, bank, dan sebagainya) secara berkala; **2** pengujian efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkannya;
 - **balas jasa** tinjauan berkala oleh konsultan atas gaji, upah, dan tunjangan;
 - **keuangan** pengujian kebenaran pembukuan;

-- **pemasaran** penilaian strategi pemasaran, jasa, fungsi, dan hasilnya;

mengaudit/meng-au-dit/ v melakukan audit;

pengaudit/peng-au-dit/ n pejabat yang berwenang menguji dan mengesahkan laporan keuangan.

(<https://kbbi.web.id/audit>)

4. **Deviden Payout Ratio** (DPR) adalah sebuah parameter untuk mengukur besaran dividen yang akan dibagikan ke pemegang saham. Formulasnya: nilai dividen yang dibagikan per saham dibanding dengan nilai laba bersih per saham. (<https://economy.okezone.com/read/2011/03/28/226/439455/dividend-payout-ratio-dpr>).
5. **Tagline** Jakarta sebagai *Global City* adalah didasarkan pada laporan Membangun Jakarta sebagai Kota Cerdas Berskala Global yang dipublikasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, kota global merupakan kota yang memiliki peran penting dalam pengintegrasian ekonomi transnasional (menjadi *primary node* dalam jaringan ekonomi dunia) yang mampu menarik modal, barang, sumber daya manusia, gagasan, serta informasi secara global. Dan saat ini, Jakarta telah menduduki peringkat ke-45 dari 48 kota dalam *Global Power City Index* (GPCI), peringkat ke-152 dari 183 kota dalam *Cities in Motion Index*, peringkat ke-139 dari 173 kota dalam *Economic Intelligence Unit* (EIU) *Livability Index*, serta peringkat ke-69 dari 156 kota dalam *Global City Index* (GCI). Semangat untuk meningkatkan taraf kota global ini yang akan diupayakan pada 2024. (Amira Sofa, Upaya Jakarta Menuju Kota Global, <https://smartcity.jakarta.go.id/id/blog/upaya-jakarta-menuju-kota-global/>, 5 Januari 2024).
6. Sistem manajemen kas (*cash management system*/CMS), adalah sistem yang membantu mencatat, melacak, memperkirakan, dan melaporkan arus kas suatu bisnis. Sistem ini melacak pergerakan uang masuk dan keluar perusahaan melalui berbagai saluran, cabang, dan struktur. (Aishwarya Srivastava, Sistem Manajemen Kas – Jenis, Cara Kerja dan Praktik Terbaik, <https://happay.com/blog/cash-management-system/>, 7 Maret 2024).
7. YoY atau *Year on Year* adalah pertumbuhan dari tahun ke tahun. Istilah ini umumnya menjadi solusi dan cara untuk membandingkan statistik kinerja bisnis dari satu periode tertentu. Misalnya, membandingkan kinerja dari kuartal tahun sebelumnya dengan kerangka waktu saat ini. YoY dilakukan dengan cara menghitung perubahan pada persentase selama satu tahun dalam periode atau jangka waktu tertentu. Perhitungan ini digunakan untuk membandingkan kondisi ekonomi, keuangan, serta bisnis dari tahun ke tahun. YoY juga dapat dipakai untuk mengetahui apakah pencapaian bisnis tahun ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (Martha Warta Silaban, Mengenal Apa Itu YoY dalam Bisnis dan Cara Menghitungnya, <https://bisnis.tempo.co/read/1693005/mengenal-apa-itu-yoy-dalam-bisnis-dan-cara-menghitungnya>, 18 Februari 2023).
8. Pendapatan bunga merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada entitas untuk meminjamkan uangnya serta jumlah yang didapat dari investor yang disimpan dalam bentuk investasi. Perbankan mendapatkan pendapatan bunganya dari nasabah yang menanamkan dananya di salah satu perbankan Indonesia serta yang menanamkan di pihak ketiga bank lainnya. Pendapatan bunga bersih merupakan pendapatan yang mencerminkan perbedaan antara pendapatan yang diperoleh aset yang terdapat bunga bank dan biaya yang terkait pembayaran kewajiban yang mendapatkan bunga. Pendapatan bunga bersih juga pendapatan yang kena pajak dan disajikan dalam laporan laba rugi karena merupakan akun pendapatan (Yulia Nurfitriani Harnaen, Pengaruh Pendapatan Bunga Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2018, Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan, 2 (3), 2021, hal 15 – 20, ISSN: 2686-1054 (media online), <https://aktiva.nusaputra.ac.id/article/download/117/123/>).
9. Pendapatan berbasis komisi atau *fee based income* adalah keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya selain *spread based* (selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman) (Imam Buchori, *Fee Based Income* dalam Perspektif Fikih Muamalah, Al-Qānūn, Vol. 13, No. 2, Desember 2010, hal 261 – 285, <https://jurnalafh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/download/177/164/166>).